

BAB I

PENDAHULUAN

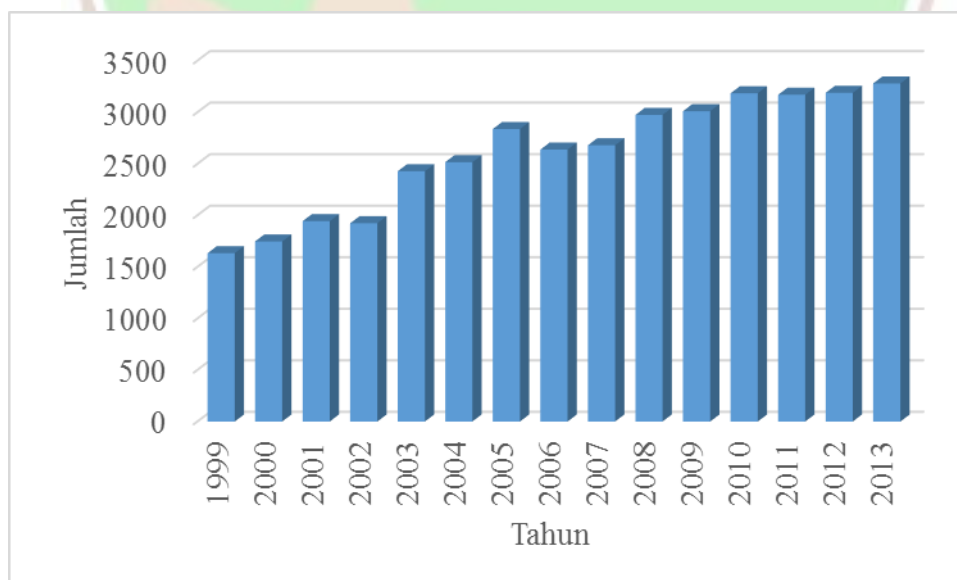
Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (UU 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 16, ayat (1)). Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan banyak munculnya perguruan-perguruan tinggi baru dari tahun ke tahun baik dalam bentuk universitas, akademi, institut, politeknik, dan sekolah tinggi yang berstatus negeri maupun swasta yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Data dari PDDIKTI menyebutkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 370 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tercatat sebanyak 4.043 perguruan tinggi.

Jumlah perguruan tinggi yang semakin meningkat menyebabkan daya saing antar perguruan tinggi semakin kompetitif terutama pada PTS yang jumlahnya jauh melebihi PTN. Masing-masing PTS saling membenahi diri untuk memberikan kualitas yang memuaskan bagi semua pihak dan tidak tertinggal oleh kualitas PTN. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014), kualitas perguruan tinggi dinilai berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang dirangkum dalam standar nasional pendidikan tinggi. Menurut Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti pasal 3, standar-standar tersebut

wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan program studi. Pelaksanaan standar-standar ini perlu pengawasan agar menjamin kelayakan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program tri dharma perguruan tinggi. Salah satu lembaga yang bertugas membina dan mengawasi kinerja perguruan tinggi yaitu Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dimana sebagai lembaga yang membantu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PTS agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kopertis adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya. Kopertis terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968 dan Surat Keputusan Nomor 079/O/1975 tanggal 17 April 1975 dimana perlu dibentuk Koordinator Perguruan Tinggi (KOPERTI) yang mempunyai fungsi sebagai aparatur konsultatif dengan kepala kantor perwakilan pendidikan dan kebudayaan setempat untuk membatasi ruang lingkup kerja, khususnya untuk memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi swasta (www.kopertis4.or.id).



Gambar 1.1. Pertumbuhan Perguruan Tinggi di Indonesia (Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015)

Tugas pokok dan fungsi Kopertis yaitu merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (www.kopertis5.org). Kopertis terdiri dari 14 wilayah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Proses dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ditemukan permasalahan yang terjadi pada PTS di Indonesia, salah satunya dapat dilihat melalui proses pengawasan yang dilakukan oleh Kopertis wilayah X. Kopertis wilayah X membina dan mengawasi kinerja PTS yang ada di Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau yang terdiri dari 246 perguruan tinggi, diantaranya 28 universitas, 86 akademi, 126 sekolah tinggi, 1 institut, dan 5 politeknik. PTS di wilayah X ini masih banyak yang belum terakreditasi secara institusi sehingga PTS tersebut belum terjamin mutu dan kelayakannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Persentase PTS yang telah mendapatkan akreditasi maupun belum terakreditasi secara institusi di wilayah X tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Persentase Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah X

No	Akreditasi	Jumlah	%
1	A	0	0
2	B	16	6,5%
3	C	43	17,48%
4	Tidak terakreditasi	187	76,02%
Total		246	100%

(Sumber : Kopertis Wilayah X, 2017)

Data diatas menunjukkan bahwa banyak yang harus dibenahi dari kinerja PTS jika dilihat dari akreditasi secara institusi, dimana pada Kopertis wilayah X terdapat 76,02% PTS yang belum terakreditasi dari total PTS di wilayah X sebanyak 246 perguruan tinggi. Kemudian hanya 9,5% PTS yang mendapatkan akreditasi B dimana PTS tersebut sudah tergolong perguruan tinggi yang mempunyai kualitas bagus. Sementara itu, akreditasi C merupakan akreditasi

minimal yang diberikan oleh BAN-PT bagi perguruan tinggi yang lulus proses akreditasi. PTS yang tidak terakreditasi tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu belum melakukan proses akreditasi atau masa akreditasi yang sudah kadaluarsa dan belum mengurusnya kembali. Namun, PTS yang terakreditasi secara program studi sudah ada yang memiliki akreditasi A maupun B. Akreditasi sangat berpengaruh terhadap mutu lulusan dari sebuah perguruan tinggi dan dalam menarik mahasiswa baru. Akreditasi juga mencerminkan kualitas internal dan eksternal dari sebuah perguruan tinggi. Selain itu, berdasarkan surat pemberitahuan dari Komite Akreditasi Nasional tahun 2015, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menonaktifkan 22 PTS di wilayah Kopertis X karena dianggap tidak memenuhi standar. Sembilan diantaranya merupakan PTS di Sumatera Barat, dua PTS di Riau, lima PTS di Jambi, dan enam PTS di Kepulauan Riau.

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu dilakukan evaluasi kinerja akademik terhadap PTS sebagai alat untuk melihat apakah standar mutu yang telah ditetapkan pada dokumen akademik telah dilaksanakan oleh PTS tersebut. Hal ini juga sejalan dengan misi dari koordinator kopertis wilayah X, Prof. Dr. Herri, SE, MBA yang menyampaikan dalam pidatonya pada kegiatan Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara PTS (Yayasan) di lingkungan Kopertis Wilayah X pada tanggal 02 Desember 2016 bahwa kopertis wilayah X perlu mengejar ketertinggalan dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi melalui perbaikan kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kemudian, evaluasi kinerja merupakan proses penilaian kinerja aparatur untuk melihat kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi (Wibisono, 2006).

Evaluasi kinerja akademik pada PTS perlu dilakukan untuk menilai mutu, kapasitas dan kelayakan dari perguruan tinggi tersebut dalam menyelenggarakan

program tri dharma perguruan tinggi serta kesesuaian kinerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan peringkat mutu PTS tersebut dalam bentuk akreditasi. Menurut BAN-PT (2011), tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi yaitu:

1. Memberikan jaminan terhadap masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Berdasarkan tujuan dan manfaat tersebut, Kopertis telah melakukan evaluasi kinerja akademik dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi (Monev) terhadap PTS yang menjadi binaannya secara periodik setiap tahunnya. Hal ini diketahui melalui hasil wawancara dengan Bapak Jamurin selaku Kepala Sesi Kelembagaan Kopertis wilayah X yang bertugas dalam melakukan Monev terhadap kinerja PTS. Bapak Jamurin menyebutkan bahwa terdapat suatu badan yang bertugas dalam melakukan Monev terhadap kinerja PTS yang disebut Pengawas Pengendalian dan Pembinaan (Wasdalbin). Wasdalbin melakukan evaluasi langsung ke lapangan dengan membawa *form* yang berisi indikator-indikator penilaian. Bentuk penilaian yang dilakukan sebelumnya hanya berupa *form checklist* dimana terdapat pilihan ada atau tidaknya indikator mutu yang telah ditetapkan pada PTS tersebut serta bentuk penilaian deskriptif berupa uraian keterangan yang menjelaskan adanya indikator itu. *Form checklist* yang digunakan dinyatakan kurang informatif bagi Kopertis sendiri yaitu pihak Kopertis tidak mendapatkan informasi yang sesuai dengan keinginannya dimana pihak kopertis juga ingin melihat sejauh mana pelaksanaan dari instrumen-instrumen tersebut. Kemudian, setiap PTS memiliki tingkat mutu yang berbeda-beda pada masing-masing indikator mutu sehingga akan sulit dalam pemberian skor dalam penentuan akreditasi nantinya. Selain itu, bentuk penilaian yang dekskriptif juga dapat mengakibatkan munculnya unsur subjektif oleh tim

evaluasi dimana instrumen penilaian yang diberikan tidak terukur dan terarah dikarenakan setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap penjelasan dari indikator penilaian tersebut.

Oleh karena itu, perlu dirancang suatu alat evaluasi kinerja akademik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Penilaian secara kualitatif bertujuan untuk melihat gambaran kondisi PTS tersebut, sedangkan penilaian kuantitatif akan membuat penilaian lebih akurat dan terukur yang bisa dibuktikan dengan perhitungan angka. Salah satu bentuk evaluasi yang bisa digunakan yaitu rubrik.

Rubrik merupakan deskripsi terperinci mengenai tipe kinerja tertentu dan kriteria yang akan digunakan untuk menilainya (Arens, 2013). Menurut Bapak Jamurin, penggunaan rubrik dapat diterapkan pada sistem Monev ini dimana tim evaluasi akan memberikan penilaian yang lebih objektif berdasarkan kondisi PTS tersebut yang akan dinilai berdasarkan kriteria-kriteria mutu yang telah ditentukan dan masing-masing kriteria memiliki skor penilaian. Semakin tinggi mutu suatu PTS, maka semakin tinggi skor yang akan diberikan. Pemberian skor juga didasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh PTS tersebut baik berupa dokumen, fasilitas yang dimiliki maupun sistem akademiknya. Selain itu, masing-masing kriteria pada rubrik juga dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi sehingga penilaian lebih terarah. Sistem penilaian ini juga sudah digunakan pada evaluasi kinerja PTN.

Selain rubrik dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kinerja akademik PTS, rubrik ini juga dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PTS tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dimana selama ini Kopertis belum ada alat untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing PTS. Komponen penilaian yang akan digunakan pada rubrik yaitu berdasarkan instrumen visitasi lapangan evaluasi kinerja akademik dengan indikator berasal dari instrumen Monev serta butir peraturan Permenristekdikti yang sudah digunakan oleh Kopertis sebelumnya dalam evaluasi kinerja PTS. Maka, hasil

evaluasi ini dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja akademik PTS tersebut kedepannya sehingga diharapkan tidak ada PTS yang dinonaktifkan lagi dan segera mendapatkan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamurin selaku Kepala Sesi Kelembagaan Kopertis wilayah X, Kopertis dalam melakukan pengolahan maupun penyimpanan data hasil evaluasi masih dalam bentuk manual. *Form* evaluasi disusun dan kemudian hasil evaluasi dirangkum dalam sebuah kertas yang berisi kesimpulan berupa kesalahan yang dilakukan oleh PTS serta rekomendasi perbaikannya. Hal ini memiliki banyak kekurangan yaitu lambatnya dalam memproses data dimana tim evaluasi harus membaca satu per satu hasil evaluasi dan membuat kesimpulannya. Kemudian metode penyimpanan data yang dilakukan juga kurang efektif dimana hasil evaluasi hanya disimpan dalam lembaran kertas yang dapat menyebabkan hilangnya data. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi dalam bentuk sistem berbasis komputer yang akan membantu Kopertis dalam memproses dan menyimpan data hasil evaluasi. Selain itu, sistem ini akan memudahkan dalam pengaksesan maupun pengeluaran data jika dibutuhkan.

1.2 Perumusan Masalah

Alat bantu yang digunakan Kopertis dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja (Monev) belum memadai sehingga perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang suatu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja akademik perguruan tinggi swasta serta mengimplementasikannya ke dalam aplikasi sistem informasi berbasis komputer.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rancangan alat bantu untuk mengevaluasi kinerja akademik perguruan tinggi swasta serta diaplikasikan dalam bentuk sistem informasi berbasis komputer.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan topik yaitu evaluasi kinerja akademik di PTS. Teori-teori tersebut berhubungan dengan manajemen kinerja, perguruan tinggi, Kopertis, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), *monitoring* dan evaluasi (Monev), instrumen visitasi lapangan evaluasi kinerja akademik pada Kopertis, instrumen Monev, pelanggaran pada penyelenggaraan pendidikan tinggi menurut peraturan Permenristekdikti, metode Delphi, metode *cut off point*, dan sistem informasi berbasis komputer.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan penelitian tugas akhir yang dilakukan. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, perancangan rubrik dengan metode Delphi dan *cut off point*, perancangan aplikasi sistem berbasis komputer, verifikasi dan validasi, analisis, dan penutup.

BAB IV PERANCANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA AKADEMIK PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bab ini memaparkan langkah-langkah dalam perancangan sistem evaluasi kinerja akademik pada PTS. Langkah-langkah ini terdiri dari perancangan rubrik evaluasi yang dimulai dari perumusan komponen masalah dan indikator penilaian, penentuan indikator penilaian (Delphi fase I), serta perancangan dan validasi kriteria masing-masing indikator penilaian (Delphi fase II). Setelah itu, dilakukan perancangan aplikasi sistem informasi berbasis komputer serta verifikasi dan validasi aplikasi tersebut.

BAB V ANALISIS

Bab ini berisikan analisis mengenai proses maupun hasil perancangan sistem evaluasi kinerja akademik ini. Analisis tersebut terdiri atas analisis perancangan rubrik, analisis perancangan aplikasi sistem informasi berbasis komputer, analisis perbandingan sistem evaluasi sebelumnya dengan rancangan sistem sekarang, dan analisis kekurangan dari sistem yang ada saat ini.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil perancangan yang telah dilakukan. Kesimpulan memuat hal-hal yang telah dicapai pada tujuan penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang bisa diberikan untuk penelitian serupa selanjutnya.

